

**ANALISIS PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH UNTUK  
PEMBERDAYAN UMKM JAJANAN LOKAL MANDAR KABUPATEN  
MAJENE**

**Dedi Surianto<sup>1</sup>, Taufik Hidayat B Tahawan<sup>2</sup>, Herlina Ilyas<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sulawesi Barat

E-mail : [dedisurianto21@gmail.com](mailto:dedisurianto21@gmail.com)<sup>1</sup>, [taufikhidayat@unsulbar.ac.id](mailto:taufikhidayat@unsulbar.ac.id)<sup>2</sup>,  
[herlinailyas@unsulbar.ac.id](mailto:herlinailyas@unsulbar.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the regional financial planning of Majene Regency in an effort to empower MSMEs producing local Mandar.. This research uses a descriptive qualitative method with a field study and documentation approach. The main focus of this research is to analyze how regional financial policies, particularly those stipulated in the Regional Budget (APBD) and Regional Work Plan (RKPD), play a role in strengthening the local MSME sector. The results indicate that regional financial planning has attempted to allocate funds for MSME empowerment, but its implementation still faces obstacles such as limited funds, weak inter-agency coordination, and low digital literacy among MSMEs. This study's recommendations emphasize the importance of integrating regional financial policies with empowerment programs based on local potential and increasing the capacity of MSMEs producing local Mandar snacks through ongoing mentoring and training.*

**Keywords:** Regional Financial Planning, Empowerment, MSMEs, Mandar Local Snacks, Majene Regency.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan keuangan daerah Kabupaten Majene dalam upaya pemberdayaan UMKM jajanan lokal Mandar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan dan studi dokumentasi. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kebijakan keuangan daerah, terutama yang tertuang dalam APBD dan RKPD, berperan dalam penguatan sektor UMKM lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan daerah telah berupaya mengalokasikan dana pemberdayaan UMKM, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan dana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya literasi digital pelaku UMKM. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya integrasi kebijakan keuangan daerah dengan program pemberdayaan berbasis potensi lokal serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM jajanan Mandar melalui pendampingan dan pelatihan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perencanaan Keuangan Daerah, Pemberdayaan, UMKM, Jajanan Lokal Mandar, Kabupaten Majene.

---

**PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional maupun daerah. Di Indonesia, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat basis ekonomi kerakyatan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari peran serta sektor UMKM, termasuk di daerah-daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang khas.

Di Kabupaten Majene yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat memiliki kekayaan kuliner tradisional khas etnis Mandar yang menjadi bagian dari identitas budaya dan potensi ekonomi lokal. Jajanan lokal Mandar seperti cucur, paso-paso, bolu paranggi, dan apang, bukan hanya berfungsi sebagai konsumsi sehari-hari, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang memiliki nilai jual tinggi, khususnya dalam sektor pariwisata dan perdagangan antar wilayah. Sayangnya, UMKM yang memproduksi jajanan ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk keterbatasan modal, rendahnya akses teknologi, lemahnya kapasitas manajerial, dan kurangnya dukungan kebijakan yang bersifat berkelanjutan.

Jajana lokal Mandar di Kabupaten Majene dapat berkembang secara berkelanjutan dalam pembangun daerah dan masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan ini. Konsumen lebih percaya

bahwa barang yang mereka beli dibuat dengan cara yang halal, bermoral dan penuh keberkahan. Selain itu dapat juga membantu bisnis mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, yang memungkinkan mereka menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih stabil dan mempertahankan budaya kuliner Mandar yang telah di wariskan secara turun – temurun.

Berikut data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Majene.

Aspek	Data/Keterangan
Sektor UMKM yang Ditelaah	Kuliner Lokal dan Jajanan Lokal Mandar
Jumlah Pelaku UMKM(2024)	Lebih dari 2.0000 pelaku
Askes ke Program Pemerintah (Pembinaan dan Pembiayaan)	Hanya sebagian kecil yang mendapat akses langsung
Isu Utama yang Diangkat	Ketimpangan antara potensi ekonomi sektor dan realisasi dukungan dengan anggaran daerah
Periode Telaah Keuangan Daerah	Lima Tahun terakhir (2020-2024)

Dalam konteks ini, penting untuk menelaah bagaimana proses perencanaan keuangan daerah di Majene selama lima tahun terakhir (2020–2024) telah mengakomodasi kebutuhan pemberdayaan

UMKM, khususnya sektor jajanan lokal Mandar

Namun, potensi besar tersebut belum diikuti dengan strategi pemberdayaan yang optimal. Salah satu tantangan utama adalah minimnya dukungan yang terencana dan berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam hal pembiayaan, pelatihan, dan promosi produk. Banyak pelaku UMKM jajanan lokal Mandar masih beroperasi secara tradisional, dengan modal terbatas, manajemen usaha yang belum profesional, serta akses pasar yang sempit. Dalam konteks inilah, peran pemerintah daerah melalui perencanaan keuangan menjadi sangat strategis dan menentukan.

Perencanaan keuangan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seharusnya dapat menjadi instrumen utama dalam mengarahkan pembangunan daerah secara terukur, termasuk dalam mendukung sektor UMKM. Namun dalam banyak kasus, perencanaan keuangan ini masih bersifat top-down dan tidak sepenuhnya berbasis pada kebutuhan lapangan. Program-program pemberdayaan UMKM seringkali tidak sinkron antara satu OPD dengan OPD lainnya, tidak berbasis data, dan tidak memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Teridentifikasi adanya disproporsionalitas di Kabupaten Majene antara alokasi anggaran untuk program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan proyeksi dampak ekonomi yang dapat di

impikasinya. Selain itu, program-program pelatihan dan pembinaan belum menyentuh seluruh pelaku UMKM secara merata. Terlebih lagi, belum banyak kebijakan fiskal daerah yang secara spesifik mengangkat sektor jajanan lokal sebagai potensi unggulan daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan makro daerah dengan kebutuhan mikro di lapangan.

Perencanaan keuangan daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangannya secara lebih mandiri, termasuk dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu sektor yang sangat potensial namun kerap terabaikan dalam perencanaan keuangan adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya UMKM berbasis kearifan lokal seperti jajanan tradisional. Selain itu, dinamika kebijakan fiskal pasca pandemi COVID-19 turut mempengaruhi pola alokasi anggaran daerah. Banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Majene, mengalihkan fokus belanja publik pada sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial, yang pada akhirnya mempersempit ruang fiskal untuk sektor produktif seperti UMKM. Namun, pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuntut adanya reorientasi kembali anggaran daerah agar tidak hanya reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktif dalam membangun ketahanan ekonomi lokal.

Pengelolaan usaha UMKM dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak

menjadi pilihan karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh karena itu aktivitas UMKM tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti, oleh karena itu mayoritas UMKM di Kabupaten Majene beroperasi kurang lebih dari 10 tahun. Berdasarkan Hasil Listing SE2016 di Kabupaten Majene terdapat 19.443 usaha yang tergolong dalam usaha makanan. Industri makanan memiliki peluang besar untuk berkembang karena didukung oleh kondisi geografis dan sumber daya alam Kabupaten Majene. Luas alam Kabupaten Majene memungkinkan menyiapkan hasil alam yang besar, dalam hal ini terbukti dengan kontribusi pertanian yang besar-besarnya hasil pertanian dapat menjadi input dan bahan baku industri pengolahan terkhusus pada usaha makanan. Usaha makanan yang banyak berkembang diantaranya Usaha Kue Basa, Gula Merah, Minyak dari Kelapa, Pengeringan Ikan, Penggilingan Gabah, Tahu, dan Tempe.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah yakni secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui iklim pengembangan kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dalam menguatkan potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) dalam rangka ini perlu

dilakukan langkah-langkah nyata dan menghubungkan penyediaan berbagai masukan atau input. (Ayuningtyas & Wibawani, 2022).

Adanya sektor UMKM dapat menciptakan berbagai manfaat bagi daerah diantaranya seperti dapat menghadiri wirausaha yang baru sehingga dapat menciptakan lapangan pekerja yang pastinya hal tersebut pasti akan menyerap tenaga kerja (Karimah et al., 2021). Pemerintah daerah dalam hal ini dapat memberikan dorongan kepada masyarakat dalam berwirausaha. Salah satunya yaitu (UMKM). Sektor UMKM merupakan kegiatan Wirausaha ekonomi yang bisa dimiliki satu orang maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengusaha UMKM tentang pentingnya perencanaan keuangan ,yang memberikan rekomendasi strategi ,untuk pemberdayaan usaha yang tepat bagi pelaku UMKM dan membantu dalam mengelolah keuangan usahanya sehingga lebih efektif .

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberikan judul: **Analisis perencanaan keuangan daerah untuk pemberdayaan UMKM jajanan lokal Mandar Kabupaten Majene.**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Analisis perencanaan keuangan daerah untuk pemberdayaan UMKM jajanan lokal mandar di Kabupaten Majene?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan diatas tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana Analisis perencanaan keuangan daerah untuk pemberdayaan UMKM jajanan lokal mandar di Kabupaten Majene.

### **Manfaat penelitian**

#### **Manfaat Teoritis**

1. Bagi penulis sebagai bahan perbandingan dengan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan literatur yang telah membaca.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi awal dalam menjalankan penelitian yang serupa dan memperdalam pemahaman tentang perencanaan keuangan daerah untuk pemberdayaan UMKM
3. Bagi Universitas Sulawesi Barat jurusan Akuntansi, memberikan kontribusi dalam pemahaman mahasiswa, terutama yang fokus pada akuntansi keuangan daerah, gital bisnis serta menjadi tambahan sumber

pengetahuan dalam mata kuliah terkait.

#### **Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi para pelaku usaha jajanan lokal Mandar di Kabupaten Majene dalam analisis perencanaan keuangan daerah untuk pemberdayaan UMKM jajanan lokal mandar. Dengan memahami perencanaan keuangan daerah untuk pemberdayaan UMKM ini, pelaku usaha dapat mengelola keuangan mereka secara lebih transparan,

akuntabel, dan berkesinambungan, yang pada akhirnya mendukung keberlangsungan usaha mereka.

2. Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga dalam menyusun kebijakan atau program pelatihan yang mendukung pengembangan UMKM berbasis. Pemerintah dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk merancang strategi pembinaan yang lebih efektif bagi para pelaku usaha lokal, sehingga tercipta ekosistem bisnis yang lebih sehat dan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal
3. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi lembaga keuangan daerah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM. Dengan adanya informasi mengenai sejauh mana prinsip akuntansi keuangan diterapkan, lembaga keuangan dapat menilai risiko dengan lebih akurat dan memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Konsep Perencanaan Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2021), perencanaan keuangan daerah merupakan proses sistematis dalam menentukan arah, prioritas, serta alokasi sumber daya keuangan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Dokumen yang menjadi dasar proses ini antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**Pemberdayaan UMKM**

Pemberdayaan UMKM adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil agar mandiri, inovatif, dan berkelanjutan (Sumarsono, 2020). Kegiatan ini meliputi pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan, dan promosi produk. Dalam konteks daerah, pemberdayaan juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi.

**Jajanan Lokal Mandar sebagai Produk Unggulan**

Jajanan lokal Mandar seperti Bolu Paranggi, Japa, Kue Taloba, dan Onde-onde Mandar merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat. Selain bernilai ekonomi, produk ini mencerminkan warisan kuliner yang memiliki potensi untuk dipromosikan sebagai ikon wisata kuliner daerah.

**Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat (community empowerment theory) dan teori perencanaan pembangunan partisipatif. Keduanya menjelaskan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses kebijakan dan pentingnya kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan sosial ekonomi masyarakat

**METODE PENELITIAN****Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu Metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai realisasi melalui berpikir induktif. Metode penelitian

kualitatif dengan analisis deskriptif dan SWOT dapat di gunakan untuk memahami pengalaman dan perspsi pelanggan tentang makanan dan layanan yang di sediakan oleh para pelaku UMKM lokal. Dalam hal ini teknik pengunmpulan data seperti observasi, wawancara dan studi dokumen dapat di gunakan memahami pengalaman UMKM secara mendalam, sedangkan analisis deskripif dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik wisatawan dan pola yang muncul . seaini ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi faktual secara mendalam mengenai kebijakan perencanaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap pelaku UMKM lokal.

**Jenis penelitian**

penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang di gunakan untuk menyelediki kejadian dan fenomenan dengan meminta induvidu atau sekelompok induvidu meneritakan pengalaman mereka yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

**Infarman penelitian**

Penelitian informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah di mana peneliti dengan sengaja memilih responden yang memenuhi kreteria tertentu untuk berperan sebagai informan dalam penelitian . penelitian pada BKD Kabupaten Majene di lakuakan dengan metode kualitatif eksploratif dan wawancara terhadap 5 informan yang di pilih secara purposive sampling dari kecamatan yang merupakan bagian dari daerah asal suku Mandar di Kabupaten Majene, termasuk di Banggae

timur, Pamboang, Sendana, Banggae, dan Pamboborang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perencanaan Keuangan Daerah Pada UMKM jajanan lokal Mandar Kabupaten Majene

Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki kekayaan kuliner tradisional khas Mandar seperti bolu parangi, jepa, apang, kue tabola, cucur, katirisala, dan baje. Produk – produk ini banyak di hasilkan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di beberapa kecamatan, terutama di Banggae timur, banggae, pamboang dan sendana.

Selama periode 2020–2024, Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Keuangan Daerah dan Bappeda berupaya menyusun perencanaan keuangan yang inklusif terhadap sektor UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Koperasi dan UMKM, anggaran untuk kegiatan pemberdayaan UMKM setiap tahun meningkat, namun porsi terhadap total APBD masih relatif kecil, sekitar 2,5–3% dari total belanja daerah

➤ *Kami butuh bantuan dari pemerintah bukan hanya modal, tapi juga pelatihan pemasaran. Banyak teman-teman tidak tahu cara menjual lewat internet (menurut; ibu siti Fatimah).*

Rencana pembangunan ekonomi daerah Majene diarahkan untuk memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal, terutama sektor kuliner tradisional, perikanan, dan perdagangan kecil. Program-program seperti Pelatihan Manajemen Usaha, Bantuan Modal Bergulir, dan Festival Kuliner Mandar

merupakan bentuk implementasi dari perencanaan keuangan daerah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam hal konsistensi alokasi dana, keterlambatan pencairan anggaran, serta kurangnya pendampingan pasca program. Hal ini sejalan dengan temuan dari beberapa pelaku usaha yang menyatakan bahwa bantuan pemerintah sering kali tidak tepat waktu dan tidak selalu sesuai kebutuhan usaha di lapangan.

### Analisis Perencanaan Keuangan Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM.

Perencanaan keuangan daerah kabupaten Majene dituangkan dalam RKPD dan APBD yang memuat program penguatan ekonomi lokal, termasuk pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal Mandar

Berdasarkan data dokumen APBD (Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan). Ringkasan APBD Kabupaten Majene untuk Program UMKM 2020–2024.

Tabel 1. Ringkasan Alokasi APBD Kabupaten Majene (dalam juta rupiah) Anggaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap sektor UMKM.

Tahun	Total APBD	Alokasi UMKM dan Koprasi	Presentase(%)
2020	1,12 Triliun	3,2 Miliar	0,29%
2022	1,20 Triliun	4,7 Miliar	0,39%

2023	1,28 Triliun	5,3 Miliar	0,41%
2024	1,32 Triliun	5,9 Miliar	0,45%

*Sumber Data: Dina Koperasi Perindustrian, & Perdagangan*

Anggaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap sektor UMKM. Namun berdasarkan hasil wawancara, peningkatan anggaran ini belum sepenuhnya dirasakan secara langsung oleh pelaku UMKM tingkat bawah.

#### Perspektif Pelaku Usaha Lokal Mandar

Beberapa pelaku usaha jajanan lokal di Kabupaten Majene memberikan pandangan yang beragam mengenai efektivitas program pemerintah daerah.

Ibu Sitti Fatimah – Pemilik Bolu Paranggi Sitti di Kecamatan Banggae Timur

- *“Kami bersyukur ada perhatian dari pemerintah, tapi jujur “kadang bantuan itu tidak sesuai kebutuhan kami. Misalnya kami butuh alat oven baru dan pelatihan pengemasan, tapi yang datang justru bantuan bahan baku dalam jumlah kecil. Kalau bisa, tolong disesuaikan dengan jenis usaha kami.”*

Dari pandangan Ibu Sitti, terlihat bahwa koordinasi antar dinas masih lemah. Pemerintah daerah sering kali belum melakukan pemetaan kebutuhan spesifik dari masing-masing jenis usaha.

Bapak Rahman – Pengusaha Jepa Tradisional Rahman di Kecamatan Pamboang

- *“Selama ini program pelatihan banyak, tapi tidak ada tindak lanjut. Kami dilatih bikin kemasan, tapi tidak tahu cara jualan online. Padahal sekarang kalau tidak ikut digital, susah mi bersaing.”*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa literasi digital masih menjadi persoalan mendasar bagi pelaku UMKM di Majene. Meski pemerintah sudah mulai menggagas digitalisasi UMKM sejak 2022, sebagian besar pelaku usaha belum mampu mengakses platform e-commerce karena keterbatasan fasilitas dan kemampuan teknologi.

Ibu Nurhayati – Pembuat Kue Taloba dan Onde-onde Mandar di Kecamatan Sendana

- *“Kami di kampung tidak punya tempat jualan tetap. Kalau ada acara atau bazar, baru rame. Tapi kalau tidak ada kegiatan, sepi pembeli. Kami harap ada tempat tetap untuk jualan produk Mandar.”*

Keterangan dari Ibu Nurhayati menggambarkan kebutuhan akan infrastruktur ekonomi seperti pasar kreatif atau pusat kuliner Mandar. Hal ini sejalan dengan salah satu rencana strategis pemerintah daerah pada RPJMD, yaitu pembangunan sentra UMKM dan kuliner daerah.

#### Analisis keterkaitan APBD dan program pemberdayaan UMKM Kabupaten Majene

Keterkaitan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan program pemberdayaan Usaha



Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Majene sangat erat. APBD berperan sebagai sumber pendanaan utama yang dilegalisasi oleh pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai kebijakan dan program, termasuk yang di tunjukan untuk pengembangan UMKM.

## Evaluasi Program dan Tantangan Implementasi

Beberapa hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

1. Pelaksanaan program sudah berjalan rutin, tetapi belum memiliki sistem evaluasi kinerja berbasis hasil (output dan outcome).
2. Koordinasi antar instansi seperti Dinas Koperasi, Dinas Keuangan, dan Dinas Pariwisata masih lemah, sehingga terjadi tumpang tindih program.
3. Kapasitas SDM pelaku UMKM masih rendah dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi digital.
4. Akses pasar terbatas, karena produk jajanan Mandar masih dijual secara tradisional dan belum banyak menembus pasar regional atau nasional.

Namun demikian, ada kemajuan nyata yang patut diapresiasi. Misalnya, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majene bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendampingi pelaku UMKM melalui program Inkubator Bisnis Kuliner Mandar. Program ini berhasil melibatkan lebih dari 50 pelaku usaha lokal dan membantu mereka memperluas jaringan penjualan ke luar

daerah, termasuk ke Mamuju dan Polewali Mandar.

## Dampak Pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, dampak positif yang dirasakan pelaku UMKM jajanan lokal antara lain:

1. Peningkatan produksi dan kualitas kemasan berkat pelatihan yang dilakukan pemerintah daerah.
2. Kenaikan omzet 20–30% bagi pelaku usaha yang mengikuti kegiatan festival dan promosi daerah.
3. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya inovasi dan digitalisasi.

Namun, pelaku usaha masih menghadapi kendala utama berupa biaya bahan baku yang meningkat, kurangnya tempat usaha tetap, serta lemahnya promosi digital.

Menurut Bapak Rahman:

- *“Kami ini butuh terus didampingi, bukan Cuma dilatih satu kali. Kalau ada orang yang bantu buat toko online atau ajari cara iklan di media sosial, mungkin penjualan kami bisa naik lebih besar lagi.”*

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan, bukan hanya intervensi jangka pendek. Pendampingan yang konsisten akan membantu pelaku UMKM beradaptasi dengan perubahan pasar, terutama di era digital.

**Analisis Kebijakan dan Rekomendasi Lapangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan daerah Kabupaten Majene telah diarahkan ke program pemberdayaan UMKM, namun perlu perbaikan tata kelola anggaran dan sinergi antar-dinas.

Beberapa rekomendasi hasil lapangan antara lain:

1. Pemerintah perlu menambah alokasi dana untuk digitalisasi UMKM minimal 5% dari total program ekonomi kreatif daerah.
2. Setiap kegiatan pelatihan harus diikuti oleh program lanjutan pendampingan minimal 6 bulan.
3. Di bentuk database terpadu pelaku UMKM jajanan lokal Mandar untuk memastikan pemerataan bantuan dan promosi.
4. Pemerintah perlu bekerja sama dengan bank daerah dan perguruan tinggi dalam menciptakan model pembiayaan mikro berbasis potensi lokal.

Kebijakan perencanaan keuangan daerah perlu diarahkan lebih partisipatif dan berkelanjutan dengan melibatkan pelaku usaha secara langsung dalam penyusunan dan evaluasi program pemberdayaan

**KESIMPULAN DAN SARAN****Kesimpulan**

Perencanaan keuangan daerah Kabupaten Majene telah menunjukkan arah positif dalam mendukung pemberdayaan UMKM jajanan lokal Mandar, meski implementasinya masih terbatas. Peningkatan anggaran tiap tahun belum

diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

Kebijakan pemberdayaan UMKM perlu diarahkan untuk memperkuat digitalisasi, inovasi produk, dan kolaborasi lintas sektor. Partisipasi pelaku UMKM lokal dalam proses perencanaan juga menjadi kunci agar kebijakan lebih tepat sasaran.

**Saran**

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat alokasi anggaran berbasis hasil (performance budgeting) untuk sektor UMKM.
2. Dinas koperasi dan UMKM harus meningkatkan pelatihan digital marketing dan inovasi produk.
3. Perlu dibuat mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar program tidak hanya berhenti pada pelatihan.

antara pemerintah. Perguruan tinggi, dan sektor harus di perluas untuk mendukung berkelanjutan UMKM jajanan Mandar

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, B. D. (2022). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Pemilik Usaha Terhadap Pengelolaan Keuangan, Studi Kasus: Umkm Depok. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(1). Doi: 10.7454/jvi1.50.
- Ayuningtyas, D. D., & Wibawani, S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 281-286.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. (2021–2024). *Statistik UMKM Kabupaten Majene*. Majene: BPS.

- Bappeda Kabupaten Majene. (2020–2024). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene. Majene: Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
- Bappenas. (2021). Strategi Nasional Pemberdayaan UMKM Pascapandemi. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Majene. (2023). Laporan Tahunan Program Pengembangan UMKM. Majene: DiskopUKM Majene.
- Halim, A. (2021). Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Karimah, K., Muhtadi, R., & Kamali, K. (2021). Strategi Penanggulangan Pengangguran Melalui Peran Usaha Kecil Menengah (Ukm) Genting. Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 2(1), 107-131.
- Maria Yeti Andarias. (2024). Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten /Kota) Pespektif Peraturan Perundang. Jurnal Ilmu Sosial, 4(1).
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kabupaten Majene. (2020–2024). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene.
- Prawoto N., & Baruki A.T. (2021). Program pemberdayaan Ibu Rt Usaha Mandiri Dalam Bidang Pembuatan Kue Kering Dan Basah Kelompok Ibu Kasihan Sejahtera. Program Pengabdian Masyarakat, 432-437.
- Rahmawati, D., & Nawangsari, E. R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Pada UMKM Kampung Kue. Jurnal Kebijakan Publik, 14(4), 507-514.
- Risalatul Mu'allafah, Putri Setya Romadhoni, Adinda Rahma Rosalina, & Cynthia Eka Vlolita. (2025). Analisis Strategis Keunagan Pada UMKM Bumbu Dapur Dalam Meningkatkan Keberlanjutan Usaha. Jurnal Sosial dan Ekonomi, 1.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, S. (2020). Ekonomi UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widayati, E., & Wahyuningsih, S. (2020). Pengaruh perencanaan keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan mikro, kecil, dan menengah (Studi Kasus pada Usaha Konveksi di Semarang). Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 9(2), 77-86.
- Yuliana, S., & Kurniawan, T. (2022). Pengaruh Perencanaan Keuangan Daerah terhadap Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus di Sulawesi Selatan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Daerah, 8(1), 55–67.
- Zamroni, A., & Hasanah, L. (2021). Strategi Digitalisasi UMKM Pasca Pandemi: Tantangan dan Peluang. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 6(2), 89–98